

**PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
PADA MASA ORDE BARU (STUDI HISTORIS PEMILU 1977
DI INDONESIA)**

SKRIPSI



Oleh:

RUCHIL FARCHANDYTA AQIDAH

NIM : A02216044

**SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ruchil Farchandyta Aqidah

NIM : A02216044

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Fakultas : Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata dikemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa **pembatalan gelar keserjanaan yang saya peroleh.**

Surabaya, 12 Desember 2019

Saya yang menyatakan



Ruchil Farchandyta A

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal, 10 Desember 2019

Oleh

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

Drs. H. Abd. Aziz Medan, M.Ag.

NIP: 195509041985031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

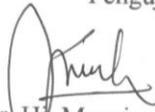
Skripsi ini telah diuji oleh penguji dan dinyatakan lulus
Pada tanggal 27 Desember 2019

Ketua/Pembimbing



Drs. H. Abd. Aziz Medani, M. Ag.
NIP. 195509041985031001

Penguji I



Dr. Hj. Muzaiyana, M. Fil. I.
NIP. 197408121998032003

Penguji II



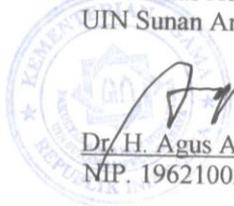
Muhammad Khodafi, S.Sos, M.Si.
NIP. 197211229200031001

Sekretaris



Suhandoko, M. Pd.
NIP. 198905282018011002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Agus Aditoni, M. Ag.
NIP. 196210021992031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ruchil Farchandyta Aqidah
 NIM : A02216044
 Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora/Sejarah Peradaban Islam
 E-mail address : aqidahruchil@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Masa Orde Baru

(Studi Historis Pemilu 1977 di Indonesia)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2019

Penulis


 Ruchil Farchandyta
 nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “PPP pada Masa Orde Baru (Studi Historis Pemilu 1977 di Indonesia) ini mengkaji permasalahan yang terfokus pada pertanyaan riset (1) Bagaimana sejarah terbentuknya PPP? (2) Bagaimana PPP pada masa Orde Baru? (3) Bagaimana elektabilitas PPP pada pemilu 1977?

Skripsi ini menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan sejarah Institusional. Adapun teori yang digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian ini adalah teori ilmu sejarah politik Ibn Khaldun mengenai kekuasaan. Pada masa Orde Baru, pemerintahan Indonesia adalah absolut dan otoriter. Dalam hal demokrasi, penguasa tidak segan-segan mengeluarkan UU parpol demi kedudukannya tidak goyah dalam parlemen sehingga Golkar yang ditunggangi oleh Orde Baru dapat dikatakan menang secara beruntun sepanjang sejarah pemilu Orde Baru. Namun, pada pemilu 1977, tepatnya secara lokal PPP mampu mengalahkan Golkar dengan unggul di DKI Jakarta dan Aceh. Kemudian bagaimana PPP sebagai parpol pada masa Orde Baru mengalami keruntuhan suara ditingkat nasional, sedangkan ditingkat lokal (DKI Jakarta dan Aceh) PPP unggul.

Dari penelitian kajian pustaka yang telah diteliti, permasalahan yang dipaparkan memiliki jawaban sebagai berikut. PPP terbentuk dari hasil fusi partai politik Islam pada masa Orde Lama. Berdiri pada 5 Januari 1973. Dinamika PPP dalam kurun waktu berdirinya hingga pemilu 1977 direpotkan oleh sistem politik Orde Baru yang merugikan parpol yakni kebijakan depolitisasi. Meskipun ruang gerak parpol dibatasi dengan UU parpol, namun PPP unggul ditingkat lokal dalam pemilu 1977 salah satunya karena strategi pemenangan pemilunya.

Kata Kunci: PPP, Orde Baru, Pemilu 1977.

ABSTRACT

The thesis entitled “ Partai Persatuan Pembangunan (PPP) in the New Orde Period (A Historical Study of 1977 Elections in Indonesia) focused on (1) How has the history of PPP been formed? (2) How was the PPP during the New Orde? (3) What was the electability of PPP in the 1977 election?

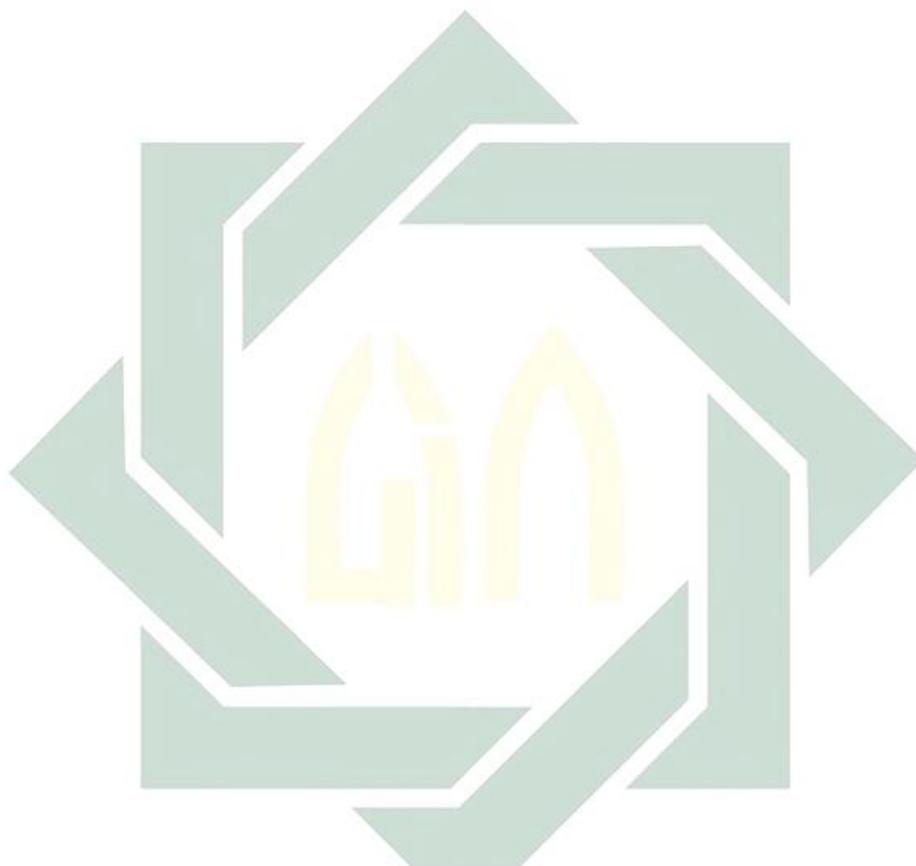
This study emPLICATED literature review with an institutional history approach. The theory used as a tool in this study is the theory of Ibn Khaldun’s political history of power. During the New Orde era, Indonesian government was absolute and authoritarian. In terms of democracy, the authorities did not hesitate to issue a political party law to secure position in parliament in order that Golongan Karya (Golkar) ridden by the new orde could win throughout the history of the New Orde Election. However, in the 1977 elections, the PPP was precisely able to defeat Golkar locally by winning in DKI Jakarta and Aceh. Provinces then how PPP as political party during the New Orde experienced a collapse of votes at the national level, while at the local level (DKI Jakarta and Aceh) PPP outreached other parties.

From the literature review research that has been studied, the problems presented have the following answers. PPP was formed as a result of the fusion of Islamic political parties during the Old Orde. Established on January 5, 1973, the dynamics of PPP since its establishment up to the 1977 election was troubled by the New Orde Political system which was detrimental to the political parties namely depoliticization policies. Although the space for political parties is limited by the political party law PPP is superior at the local level in the 1977 elections, partly because of PPP’s strategy during the election.

Keywords: PPP, New Orde, 1977’s Election.

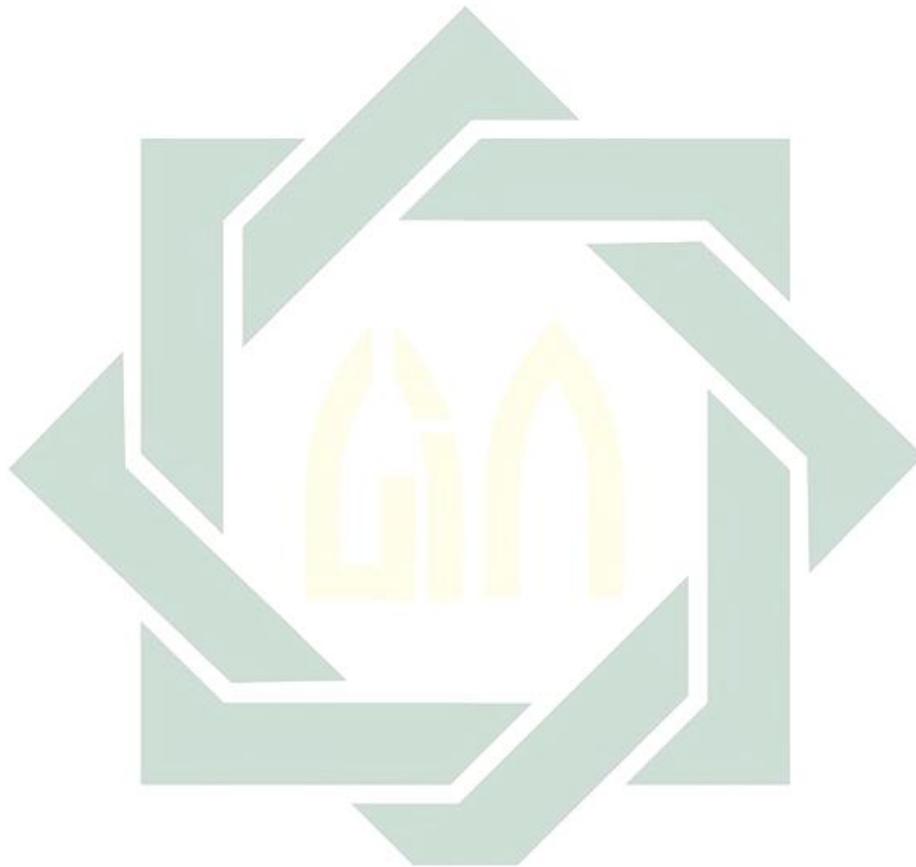
DAFTAR TABEL

4.1. Hasil pemilu 1971	48
4.2. Hasil Sementara Pemilu 1977	50
4.3. Perolehan Suara Pemilu 1977 Tingkat Provinsi	52
4.4. Perolehan Kursi DPR 1977	53
4.5. Perolehan Kursi DPR dalam Pemilu 1982	54
4.6. Perubahan suara dalam Pemilu 1977 dengan 1982	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kampanye PPP	70
Lampiran 2: Kampanye Golkar.....	73
Lampiran 3: Kampanye PDI	74
Lampiran 4: Pelaksanaan pemilu 1977	75
Lampiran 5: PPP menang dan Aksi Setengah Bendera	77
Lampiran 6: Kecurangan.....	78



suara sebanyak 10.213.650 yang berarti 18,6% dari semua suara pemilih sebesar 54.696.887. Mengutip *Kompas*, hasil dari pemilu 1971 yang dihasilkan oleh NU banyak didapatkan dari daerah pemilihan di Jawa sebesar 84,8% atau 8,66 juta dari keseluruhan suara yang diperoleh secara nasional.

Dominasi partai Islam, khususnya NU, menjadikan Soeharto khawatir kedudukannya tergoyahkan karena tidak menutup kemungkinan Golkar kalah di pemilu selanjutnya. Kemenangan Golkar dalam pemilu 1971 ini bagi Soeharto harus tetap dipertahankan dalam setiap pemilihan umum. Oleh karena itu, Soeharto mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan *Hegemonic Party System* dimana partai politik mendominasi proses politik lainnya. Kalaupun ada partai politik lain, maka partai politik tersebut dijadikan sebagai partai politik pelengkap. Dengan penyederhanaan politik tersebut, Soeharto telah menggabungkan 2 parpol hasil fusi yakni PPP dan PDI.

Meskipun partai-partai Islam telah berfusi, PPP tetap mampu menjaga elektabilitasnya dalam pemilu 1977. Justru setelah dilakukan fusi ini, PPP berhasil menambah kursi di parlemen. Di tingkat nasional PPP memperoleh tambahan 5 kursi dibanding pemilu sebelumnya (1971). PPP berhasil mencapai 18.743.491 suara dengan perolehan 99 kursi.

Dari pemilu yang diselenggarakan pada 2 Mei 1977, diperoleh penghitungan suara sementara oleh LPU pada 3 Mei 1977 dini hari.

pengungsian di kantor PPP. Selain itu, ada beberapa kampanye batal karena sulitnya surat perizinan. Di Jember daerah paling bahaya setidaknya bagi PPP. Kecamatan-kecamatan Tempurejo, Sumberjambe, Ambulu dan Mangli hampir dinyatakan bebas parpol.

Menuju bulan April tepatnya pada 7 April pengadilan Negeri Sidoarjo memvonis Ny. Aisyah binti M. Thoib dengan kasus melakukan kampanye untuk PPP tanpa izin. Ny. Aisyah dipenjara selama 1 bulan dengan masa percobaan 2 bulan. Melihat tersebut tentunya PPP tidak tinggal diam. Biro Pembela Hukum LPUI-DPP PPP membentuk Korps Sukarelawan Pembela Hukum dengan anggotanya adalah sarjana dan mahasiswa hukum guna membela para tertuduh.

Intimidasi dan kecurangan tak berhenti disitu, menjelang minggu tenang, beberapa parpol daerah Banyuwangi(Muncar, Glenmore, Genteng, Jajag, Giri) yang tak lain kebanyakan adalah dari PPP bersiap-siap mengungsi karena mereka takut ditangkap Koramil seperti kejadian pemilu sebelumnya.

Dari dua surat kabar tersebut (Merdeka dan Tempo), keduanya memiliki kualitas pewartaan yang berbeda. Adapun dua kasus besar yang dialami oleh PPP yang terekam dalam pemberitaan surat kabar Merdeka dan Tempo. Yakni mengenai misteri kematian H. Angin Bugis dan Kiai Hasan Bisri.

Kasus H. Angin Bugis merupakan salah satu bentuk kecurangan dan intimidasi terhadap PPP perspektif media cetak Merdeka dan Tempo.

Kedua media massa tersebut menyatakan hal serupa mengenai kasus kematian H. Angin Bugis dan Kiai Hasan Bisri yang menjadi misteri.

Dalam *Merdeka* edisi 4 Mei 1977, dipaparkan hasil sementara pemilu tingkat lokal dimana PPP unggul di DKI Jakarta dan Aceh. Namun, dihalaman yang sama diberitakan bahwa PPP memasang bendera merah putih dan ka'bah setengah tiang sebagai aksi simbolis atas meninggalnya Haji Angin Bugis, Sekretaris dewan PPP Sumatera Utara yang sebelumnya terlibat tuduhan kasus pemalsuan suara. Sejak 20 April, Angin Bugis ditahan kejaksaan tinggi Medan. Pada tanggal 4 Mei, tepatnya 3 hari setelah dibebaskan, Angin Bugis menghembuskan nafas terakhirnya.

Sedangkan versi media massa *Tempo*, Haji Angin Bugis Lubis sebelum divonis oleh pengadilan karena kasus pemalsuan surat suara pemilu, dia meninggal dunia. Haji Angin Bugis sempat diperiksa di pengadilan Negeri Medan. Dia dituduh memalsukan 60.000 surat suara. Haji Angin Bugis ditahan sejak 22 April. Pada sidang pertama diikuti oleh Adnan Buyung Nasution, Asad Umar Barewan, Nyonya Ani Abbas Manoppo dan M. Kamaluddin Lubis sebagai pembela meminta perincian mengenai penyakit Angin Bugis karena tersangka sempat dirawat dokter polisi sejak masa tahanan. Ada pendapat yang menyatakan angin sakit-sakitan dan menderita penyakit liver. Dalam kasus ini, Angin Bugis diadili dengan pidana ancaman hukuman mati yang tercantum dalam perkara bernomor 463/KPS/77.

